

**PENDAPATAN PEMERINTAH DI ERA PANDEMI COVID-19****(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT)****Elsa Sari Yuliana <sup>1)</sup>, Murti Puspita Rukmi <sup>2)</sup> Bob Mustafa <sup>3)</sup>, V. Ananta <sup>4)</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak  
Email: elsa\_sariyuliana@yahoo.com

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak  
Email: murti.uthy@gmail.com

<sup>3</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak  
Email: bobkrisna@gmail.com

<sup>4</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

***Abstract***

*The Covid-19 pandemic hit all nations in the world since the end of 2019 until now. One of the efforts to deal with the spread of the Covid-19 virus is to limit human movement in hopes of slowing transmission. With the policy of restriction of movement, it has an impact on the inhibition of economic growth. Economic movements will have an impact on the income of companies and society. This is what underlies the purpose of this study is to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on government revenues. This form of research uses qualitative and quantitative methods. The form of data used is secondary data from local government financial statements. This form of research uses qualitative and quantitative methods. The type of data used is secondary data from local government financial statements. Data collection techniques are performed with Documentation, and Library Studies. Analytical techniques with descriptive data analysis methods. This study yielded information that the Covid 19 Pandemic in general has an impact on total local government revenues.*

***Abstrak***

*Pandemi Covid-19 menerpa seluruh bangsa di dunia sejak tahun 2019 akhir hingga kini. Adapun salah satu upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 adalah dengan pembatasan gerak manusia dengan harapan memperlambat penularan. Dengan kebijakan pembatasan gerak maka berdampak pada terhambatnya pertumbuhan perekonomian. Pergerakan perekonomian akan berdampak pada penghasilan perusahaan dan masyarakat. Hal ini yang mendasari tujuan penelitian untuk menganalisa dampak pandemi Covid-19 pada pendapatan pemerintah. Bentuk Penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi Dokumentasi, dan Studi pustaka. Teknik analisis dengan metode analisis data deskriptif. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa Pandemi Covid 19 secara umum berdampak pada total pendapatan pemerintah daerah.*

**Kata Kunci:** *Pandemi Covid19, Pendapatan Pemerintah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.*

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menerpa seluruh bangsa di dunia sejak tahun 2019 akhir hingga kini. Adapun salah satu upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 adalah dengan pembatasan gerak manusia dengan harapan memperlambat penularan. Indonesia sendiri sejak bulan Maret tahun 2020 mengambil kebijakan untuk mengurangi mobilitas manusia dengan kampanye kesadaran “Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah”. Disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang didalamnya diatur mengenai pembatasan kegiatan namun tetap harus mempertimbangkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan terbatasnya gerak masyarakat pada tahun 2020 maka pergerakan perekonomian pun terlihat stagnan, hal ini tercermin pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tercatat dari laporan BPS bahwa PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun serta PDB per kapita sebesar Rp56,9 juta atau US\$3.911,7 (bps.go.id). Tercatat bahwa ekonomi pada tahun 2020 di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07 % jika dibandingkan dengan tahun 2019, penurunan ini cukup signifikan.

Pertumbuhan ekonomi yang turun tersebut terlihat tidak sejalan jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah tahun 2020. Terlihat pada tabel 1 dibawah ini realisasi penerimaan pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2020 masih lebih besar daripada tahun 2019.

**Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia**

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah)		
	2018	2019	2020
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	335 585 811 291	357 559 640 616	381 600 174 430
Pendapatan Asli Daerah	158 721 480 199	169 993 478 633	183 196 758 077
Pajak Daerah	136 095 291 940	144 039 477 959	157 267 369 388
Retribusi Daerah	1 581 850 373	1 773 258 727	2 040 156 535
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	3 647 165 336	4 265 866 248	4 342 331 768
Lain-lain PAD yang Sah	17 397 172 550	19 914 875 699	19 546 900 386
Dana Perimbangan	152 285 491 118	159 262 926 416	170 828 006 345
Bagi Hasil Pajak	24 672 298 504	19 350 728 359	27 613 522 333
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10 457 854 069	14 976 063 612	10 127 526 268
Dana Alokasi Umum	56 606 500 497	58 691 805 994	58 095 306 294
Dana Alokasi Khusus	60 548 838 048	66 244 328 451	74 991 651 450
Lain-lain Pendapatan yang Sah	24 578 839 974	28 303 235 567	27 575 410 008
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35 358 712 123	38 495 945 337	25 567 192 199
<b>JUMLAH</b>	370 944 523 414	396 055 585 953	407 167 366 629

Sumber: bps.go.id

Merujuk pada tabel diatas terjadi peningkatan sebesar Rp11.111.780.676.000,- dari penerimaan tahun 2019.

Jika dilihat dari perspektif kesehatan masyarakat, memastikan bahwa unit pelayanan kesehatan memiliki semua dana yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis ini adalah yang paling penting. Tapi secara ekonomi, mungkin sumber stres yang lebih besar akan menjadi efek dari resesi yang akan datang.

"*Social Distancing*" berskala besar akan mengurangi pengeluaran konsumen dan upah pekerja, dan pada gilirannya, menyebabkan pendapatan pajak penjualan dan pendapatan anjlok. Sebagai contoh konkrit bahwa pendapatan pajak negara Amerika Serikat turun lebih dari \$ 120 miliar atau sekitar 9 persen selama Resesi Hebat tahun 2008-2009. (Sage Belz and Louise Sheiner: 2020).

"*Lockdown*" di India berjalan selama 40 hari yang juga mengharuskan penangguhan semua kegiatan ekonomi, kecuali yang diklasifikasikan penting dan yang dilakukan dari rumah. Akibatnya, semua kegiatan ekonomi yang mengharuskan orang untuk bepergian atau bekerja di luar rumah terhenti. Hal ini mempengaruhi pendapatan pemerintah pusat dan negara bagian, terutama pendapatan pajak yang akan dihasilkan dari semua kegiatan ekonomi tersebut. (Suyash Tiwari: 2020).

Prediksi The World Bank (2020) bahwa pandemi Covid-19 akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pemerintah secara umum, hal ini dapat disajikan pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pemerintah**

<b>Revenue</b>	<b>Possible Impact</b>
Taxes	Decrease
Fees, fines, penalties, and licenses	Decrease
Revenue from exchange transactions	Decrease
Transfers from other government entities (subnational)	Increase
Other revenue	Decrease
<b>Total revenue</b>	<b>Decrease</b>

Sumber: World Bank (2020)

## 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 turun 2,07% namun realisasi penerimaan pendapatan daerah tetap naik 11,57%. Berkaca pula dengan kondisi di Amerika Serikat dan India yang mana pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pemerintah baik pusat maupun daerah, berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik merumuskan permasalahan berikut "Bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Pemerintah".

## 1.3 Tujuan dan Urgensi Penelitian

### Tujuan Umum

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya pandemi Covid-19 pada total pendapatan pemerintah, pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pemerintah daerah.

### Tujuan Khusus

Khususnya penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pandemi Covid-19 pada total pendapatan pemerintah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

### Urgensi Penelitian

Penelitian ini memungkinkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan terkait manajemen keuangan khususnya kebijakan optimalisasi pendapatan daerah di era pandemi Covid-19.

## **2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Pandemi Covid-19**

Pada tanggal 9 Maret 2020, virus Corona (COVID-19) secara resmi diumumkan sebagai pandemi oleh WHO (World Health Organization). Hal ini berarti, telah terjadi penyebaran secara luas atas virus corona di seluruh dunia. Pandemi sebagai suatu istilah bukan berkaitan dengan keganasan penyakit tertentu melainkan berkaitan dengan cakupan penyebarannya yang merata dan luas pada berbagai regional. (covid-19.go.id).

### **2.2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

PSBB adalah pembatasan kegiatan bagi masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan beberapa cara yang telah ditentukan demi upaya pencegahan kemungkinan penyebaran Covid-19. PSBB lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

### **2.3. Manajemen Keuangan Pemerintah**

Pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945 memiliki sub-organisasi yang dinamakan pemerintah daerah, oleh sebab itu Indonesia memiliki pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah terdiri menjadi dua tingkatan yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota/

pemerintah daerah kabupaten. Merujuk secara teoritis, tidak ada pemerintah yang tidak menginginkan masyarakat yang dibawah kepemimpinannya tidak sejahtera. Kesejahteraan umum dapat tercipta pada tingkat kemakmuran masyarakat dengan terpenuhinya pangan, sandang, papan dan hal ini juga tercermin pula pada aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Halim: 2017).

Dalam upaya memenuhi kesejahteraan umum masyarakat pemerintah mengelola keuangannya yang terwujud dalam APBN dan APBD, yang mana APBN merupakan wewenang pemerintah pusat dan APBD adalah wewenang pemerintah daerah. Permasalahan umum pada pengelolaan pendapatan di pemerintah adalah bagaimana mengoptimalkan perolehan pendapatannya. Optimalisasi pendapatan tersebut dalam bentuk pendapatan pajak maupun pendapatan bukan pajak. (Halim: 2017).

Peran pemerintah baik di pusat terlebih daerah akan terselenggara secara ideal apabila pelaksanaan urusan pelayanan publik diikuti potensi penerimaan daerah yang teralokasikan dengan cukup demi membiayai belanja daerah. Hal ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mendapatkan potensi-potensi yang dapat menjadi sumber pendapatannya. Adapun penggalan potensi tersebut didukung juga oleh alokasi dana transfer dari pusat sesuai dengan rencana

kegiatan prioritas nasional dan juga diberikan wewenang untuk memungut serta mengelola hasil penerimaan pajak, retribusi daerah dan beberapa komponen pendapatan daerah lainnya.

#### 2.4. Pendapatan Pemerintah Daerah

Pendapatan pemerintah dibagi menjadi dua bagian besar sesuai dengan ranah pengelolaan keuangan, yaitu pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan pemerintah daerah. Untuk pendapatan pemerintah pusat tercatat pada APBN dan pendapatan daerah tercatat pada APBD. Sebagaimana termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah uang yang masuk melalui rekening kas umum daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari: a) Pendapatan Asli Daerah; b) Dana Perimbangan; dan c) lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

#### 2.6. Penelitian Terdahulu

Kondisi serupa yang juga mengglobal adalah krisis moneter. Berdasarkan data Bappenas (2009) selama tahun 2008 pertumbuhan ekonomi negara Indonesia mencapai angka 6,1 persen. Sehingga pada saat

itu perekonomian Indonesia terdampak krisis keuangan global dan dampak tersebut dirasakan pada tahun 2008 sejak triwulan IV. Hal ini yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga sebesar 3,6 persen pada triwulan IV tahun 2008 dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), serta mengalami peningkatan 5,2 persen (yoy) jika dilihat dengan tahun 2007 di triwulan IV. Kondisi ini juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih lambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di tahun 2008 yaitu tercatat pada 6,2 persen pada triwulan I, 6,4 persen di triwulan II, 6,4 persen di triwulan III.

The World Bank (2020) mengatakan bahwa “*lockdown*” menyebabkan penurunan pajak yang signifikan. Pendapatan terutama dari industri manufaktur, konstruksi, ritel, perjalanan, dan makanan. *Value Added Tax* (VAT) atau di Indonesia umumnya disebut dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyumbang sebagian besar penurunan pendapatan pajak. Kerugian yang dialami oleh perusahaan dan tingkat pengangguran juga berdampak pada penerimaan pajak penghasilan badan.

Wabah Covid-19 dapat mempengaruhi posisi fiskal pemerintah daerah baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan. Di sisi pengeluaran, pemda dapat mengalami konsekuensi yang parah dari fase awal penyebaran virus yang mendorong permintaan layanan kesehatan dan belanja ketertiban umum karena *lockdown*. Dari sisi penerimaan, pemda

dapat mengalami penurunan penerimaan akibat melemahnya kegiatan ekonomi dan perubahan kebijakan perpajakan (OECD: 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 2008 mengalami perubahan dan jika dilihat dari sisi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah terbukti mengalami penurunan dari periode sebelum dengan sesudah krisis ekonomi 2008 yang cukup signifikan (Siti Kurniati dan Tarmizi Achmad, 2008)

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Terdiri dari 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota, 12 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten, dan 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi.

#### **3.2. Bentuk Penelitian**

Penelitian ini merupakan riset eksploratori dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Menurut Umar (2008), riset eksploratori atau biasa disebut dengan penjajakan mengenai suatu permasalahan yang belum jelas atau masih relatif baru. Sedangkan analisa deskriptif bertujuan untuk memaparkan variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Pemilihan pendekatan kuantitatif adalah agar dapat menggambarkan secara faktual, sistematis dan tepat mengenai

fakta dan keadaan sesungguhnya mengenai perkembangan dan kontribusi penerimaan daerah di era pandemi covid 19.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

1. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Sumber data melalui portal [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dihimpun dengan melalui:

- 1) Pengamatan/ observasi tidak langsung, dengan mengakses data Laporan Realisasi APBD yang terdapat pada portal data kementerian keuangan. Adapun data yang diakses ialah data Total Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer.
- 2) Studi Kepustakaan, merupakan telaah pustaka dan pengkaji berbagai buku-buku, literatur, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### **3.5. Populasi Penelitian**

Seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat merupakan populasi dalam penelitian ini. Data pemerintah daerah yang termasuk dalam Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat**

No	Pemerintah Daerah
1.	Provinsi Kalimantan Barat
2.	Kota Pontianak
3.	Kota Singkawang
4.	Kabupaten Kubu Raya
5.	Kabupaten Bengkayang
6.	Kabupaten Sambas
7.	Kabupaten Sintang
8.	Kabupaten Ketapang
9.	Kabupaten Kayong Utara
10.	Kabupaten Mempawah
11.	Kabupaten Kapuas Hulu
12.	Kabupaten Sanggau
13.	Kabupaten Landak
14.	Kabupaten Sekadau
15.	Kabupaten Melawi

Sumber: Diolah (2021)

### 3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam upaya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu teknik analisa data deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan atas variabel-variabel pada penelitian, namun sifatnya sendiri, tanpa dikaitkan atas variabel lainnya. Analisis dapat dilakukan agar diperoleh informasi mengenai berbagai hal, berdasarkan variabel tersebut (Umar, 2008: 105),

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. PENDAPATAN DAERAH DI ERA PANDEMI

Adapun gambaran perubahan total pendapatan daerah di Kalimantan Barat tersaji pada tabel 4.1:

**Tabel 4.1. Perubahan Total Pendapatan Daerah**

PEMERINTAH DAERAH	2019	2020	SELISIH	PERUBAHAN
PROVINSI KALBAR	5.968.209.003.304	5.694.171.001.349	5%	turun
KOTA PONTIANAK	1.764.013.422.653	1.547.165.136.327	14%	turun
KOTA SINGKAWANG	1.840.016.960.000	1.652.222.507.895	11%	turun
KABUPATEN KUBURAYA	1.533.363.622.188	1.477.080.851.351	4%	turun
KABUPATEN MELAWI	1.203.338.371.153	995.804.376.408	21%	turun
KABUPATEN BENGKAYANG	1.138.645.647.927	853.667.170.269	33%	turun
KABUPATEN SAMPAS	1.832.166.794.759	1.518.062.200.019	21%	turun
KABUPATEN KAYONG UTARA	777.160.669.976	633.730.381.882	23%	turun
KABUPATEN KETAPANG	2.372.979.966.093	1.220.207.872.262	94%	turun
KABUPATEN MEMPAWAH	1.032.371.184.000	976.603.858.000	6%	turun
KABUPATEN LANDAK	1.191.747.412.580	1.167.314.021.114	2%	turun
KABUPATEN SANGGAU	1.840.016.960.000	1.652.222.507.895	11%	turun
KABUPATEN KAPUAS HULU	3.673.137.449.395	3.216.496.311.986	14%	turun
KABUPATEN SINTANG	1.932.819.946.000	1.846.946.982.000	5%	turun
KABUPATEN SEKADAU	1.687.936.091.780	1.598.072.060.151	6%	turun
RATA-RATA	29.787.923.501.808	26.049.767.238.906	14%	

Sumber: Diolah (2021)

Merujuk pada tabel 4.1. dapat dilihat bahwa terjadi penurunan merata pada seluruh

total pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah di Kalimantan Barat, pada

tingkat pemerintah provinsi juga di tingkat pemerintah kota/ kabupaten. Penurunan pendapatan daerah tertinggi dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 94%, dan terendah dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yaitu sebesar 2%, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebesar 4%. Rata-rata penurunan pendapatan daerah cukup signifikan di era pandemi tahun 2020 yaitu sebesar 20%. Hal ini sesuai dengan prediksi World Bank (2020) bahwa pandemi Covid-19 akan berdampak penurunan pada penerimaan pemerintah secara umum.

Penurunan total pendapatan pemerintah dapat dilihat dari berbagai item yang merupakan bagian dari pendapatan pemerintah daerah.

Adapun bagian dari pendapatan pemerintah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan/transfer, dan Pendapatan lainnya yang sah. Adapun dari tiga bagian pendapatan pemerintah ini yang merupakan hasil dari pengelolaan potensi daerah adalah PAD. PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

#### 4.2. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI ERA PANDEMI

Berikut adalah gambaran pendapatan asli daerah di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2. Perubahan Pendapatan Asli Daerah**

PEMERINTAH DAERAH	2019	2020	PERUBAHAN
PROVINSI KALBAR	2.301.306.937.992	2.154.145.653.807	turun
KOTA PONTIANAK	478.790.894.895	403.175.414.290	turun
KOTA SINGKAWANG	166.200.430.000	163.382.873.107	turun
KABUPATEN KUBURAYA	172.839.464.395	151.009.789.229	turun
KABUPATEN MELAWI	40.577.160.352	30.872.004.588	turun
KABUPATEN BENGKAYANG	51.957.359.828	54.405.431.384	naik
KABUPATEN SAMBAS	404.280.773.149	129.676.504.956	turun
KABUPATEN KAYONG UTARA	28.597.868.471	39.525.271.732	naik
KABUPATEN KETAPANG	195.238.357.272	231.283.286.171	naik
KABUPATEN MEMPAWAH	87.574.217.000	98.615.210.000	naik
KABUPATEN LANDAK	92.870.330.406	104.159.513.963	naik
KABUPATEN SANGGAU	166.200.430.000	163.382.873.107	turun
KABUPATEN KAPUAS HULU	79.977.091.078	79.165.077.924	turun
KABUPATEN SINTANG	173.272.220.000	134.598.003.000	turun
KABUPATEN SEKADAU	45.360.926.220	47.004.174.690	naik

Sumber: Diolah (2021)

Merujuk pada tabel 4.2. diatas, terlihat pendapatan asli daerah atas 15 pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Dari data diatas dapat dilihat terdapat 6 (enam) pemerintah daerah yang mengalami peningkatan PAD yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara,



Ketapang, Mempawah, Landak, dan Sekadau. Selain pemerintah kota/kabupaten tersebut, pemerintah daerah lainnya mengalami penurunan PAD. Hal ini sangat menarik untuk ditelisik lebih lanjut, item dari PAD yang mana yang menyebabkan peningkatan PAD pada 6 pemerintah daerah tersebut.

**Tabel 4.3. PAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	51.957.359.828,00	54.405.431.384,00	Rp2.448.071.556,00	-4,71	naik
1. Pajak Daerah/	15.826.404.279,00	14.960.676.539,00	-Rp865.727.740,00	5,47	turun
2. Retribusi Daerah	3.187.583.067,00	3.747.175.908,00	Rp559.592.841,00	-17,56	naik
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.959.077.438,00	5.910.385.402,00	Rp951.307.964,00	-19,18	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	27.984.295.044,00	29.787.193.535,00	Rp1.802.898.491,00	-6,44	naik

Sumber: Diolah (2021)

Pada tabel 4.3 menampilkan gambaran rincian PAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dapat dilihat secara umum item-item yang merupakan bagian dari PAD di Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengalami kenaikan, yaitu retribusi daerah naik sebesar 17,56%, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 19,18%, juga lain-lain PAD yang sah naik sebesar 6,44%. Sehingga penurunan pendapatan pajak daerah sebesar 5,47% tidak terlalu berdampak pada total pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkayang.

**Tabel 4.4. PAD Pemerintah Kabupaten Kayong Utara**

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	28.597.868.471,00	39.525.271.732,00	Rp10.927.403.261,00	-38,21	naik
1. Pajak Daerah/	5.948.453.498,00	5.312.610.754,00	-Rp635.842.744,00	10,69	turun
2. Retribusi Daerah	8.970.514.872,00	12.084.325.540,00	Rp3.113.810.668,00	-34,71	naik
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.139.473.842,00	2.348.155.372,00	Rp208.681.530,00	-9,75	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	11.539.426.259,00	19.780.180.066,00	Rp8.240.753.807,00	-71,41	naik

Sumber: Diolah (2021)

Gambaran rincian PAD Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ditampilkan melalui tabel 4.4. Secara umum item-item yang merupakan bagian dari PAD pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalami kenaikan, terlihat retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 34,17%, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 9,75%, lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 71,41%. Kenaikan pada 3 item

tersebut menyebabkan penurunan pendapatan pajak daerah sebesar 10,69% tidak terlalu berdampak pada total pendapatan asli daerah

Kabupaten Kayong Utara sehingga total pendapatan asli daerah tetap mengalami peningkatan. Tabel 4.5. berikut menampilkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang. Dapat dilihat seluruh item dalam penyumbang pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang mengalami

peningkatan. Pajak daerah mengalami peningkatan 26,7%, retribusi daerah mengalami peningkatan 60,26%, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 16,56%, serta lain-lain PAD yang sah sebesar 5,20

**Tabel 4.5. PAD Pemerintah Kabupaten Ketapang**

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	195.238.357.272,00	231.283.286.171,00	Rp36.044.928.899,00	-18,46	naik
1. Pajak Daerah/	102.612.120.725,00	130.004.428.204,00	Rp27.392.307.479,00	-26,70	naik
2. Retribusi Daerah	5.858.936.620,00	9.389.663.336,00	Rp3.530.726.716,00	-60,26	naik
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.360.118.291,00	6.247.663.454,00	Rp887.545.163,00	-16,56	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	81.407.181.636,00	85.641.531.178,00	Rp4.234.349.542,00	-5,20	naik

Sumber: Diolah (2021)

**Tabel 4.6. PAD Pemerintah Kabupaten Mempawah**

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>87.574.217.000</b>	<b>98.615.210.000</b>	Rp11.040.993.000,00	-12,61	naik
1. Pajak Daerah/	34.746.338.000	33.853.827.000	-Rp892.511.000,00	2,57	turun
2. Retribusi Daerah	7.215.022.000	11.950.268.000	Rp4.735.246.000,00	-65,63	naik
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.670.928.000	4.657.419.000	-Rp13.509.000,00	0,29	turun
4. Lain-lain PAD yang Sah	40.941.929.000	48.153.696.000	Rp7.211.767.000,00	-17,61	naik

Sumber: Diolah (2021)

Pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat diamati pada tabel 4.6. Terjadi penurunan pendapatan pajak daerah sebesar 2,57% dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,29%. Sedangkan terjadi peningkatan yang

cukup besar pada pendapatan retribusi daerah sebesar 65,63% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 17,61%. Sedangkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Landak secara umum juga mengalami kenaikan kecuali retribusi daerah yang mengalami penurunan. Penurunan retribusi daerah sebesar 11,92%.

**Tabel 4.7. PAD Pemerintah Kabupaten Landak**

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	92.870.330.406,09	104.159.513.962,77	Rp11.289.183.556,68	-12,16	naik
1. Pajak Daerah/	39.212.707.026,00	45.533.159.974,00	Rp6.320.452.948,00	-16,12	naik
2. Retribusi Daerah	2.430.379.133,76	2.140.694.825,85	-Rp289.684.307,91	11,92	turun
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.289.774.614,05	5.014.639.773,23	Rp724.865.159,18	-16,90	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	46.937.469.632,28	51.471.019.389,69	Rp4.533.549.757,41	-9,66	naik

Sumber: Diolah (2021)

**Tabel 4.8. PAD Pemerintah Kabupaten Sekadau**

URAIAN	2019	2020	Selisih	Persentase	Keterangan
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	45.360.926.220,00	47.004.174.690	Rp1.643.248.470,00	-3,62	naik
1. Pajak Daerah/	11.889.875.370,00	12.516.632.300	Rp626.756.930,00	-5,27	naik
2. Retribusi Daerah	1.903.591.100,00	1.657.094.400	-Rp246.496.700,00	12,95	turun
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.554.942.060,00	6.702.740.640	Rp147.798.580,00	-2,25	naik
4. Lain-lain PAD yang Sah	25.012.517.690,00	26.127.707.036	Rp1.115.189.346,00	-4,46	naik

Sumber: Diolah (2021)

Hal ini serupa dengan rincian pendapatan asli daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, yaitu penurunan pendapatan terjadi pada item retribusi daerah yaitu sebesar 12,95% yang mana ini tidak bertutupi dengan peningkatan pada komponen lainnya dalam pendapatan asli daerah di Pemerintah Kabupaten Landak dan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan tampilan PAD pada 6 (enam) Pemerintah Daerah diatas, item yang banyak mengalami penurunan adalah pajak dan retribusi daerah, sedangkan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah cenderung terus naik. Hal ini menunjukkan

hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah merupakan item dari PAD yang tidak terdampak pandemi covid 19. Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah daerah lebih lagi dalam mengembangkan potensi perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

#### 4.3. PENDAPATAN TRANSFER DI ERA PANDEMI

Pendapatan Transfer yang diterima oleh pemerintah kota/kabupaten serta provinsi di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut;

**Tabel 4.9. Perubahan Pendapatan Transfer**

PENDAPATAN TRANSFER				
PEMERINTAH DAERAH	2019	2020	SELISIH	PERUBAHAN
PROVINSI KALBAR	3.635.394.245.312	3.506.829.941.604	4%	turun
KOTA PONTIANAK	945.027.112.787	868.690.778.446	9%	turun
KOTA SINGKAWANG	722.300.230.000	629.532.976.737	15%	turun
KABUPATEN KUBURAYA	1.084.951.262.529	964.995.503.675	12%	turun
KABUPATEN MELAWI	887.188.315.638	714.361.740.201	24%	turun
KABUPATEN BENGKAYANG	1.035.110.481.959	748.269.188.885	38%	turun
KABUPATEN SAMBAS	1.579.607.750.001	1.337.393.145.063	18%	turun
KABUPATEN KAYONG UTARA	724.640.428.504	567.084.225.321	28%	turun
KABUPATEN KETAPANG	2.091.169.640.417	902.403.405.036	132%	turun
KABUPATEN MEMPAWAH	785.681.087.000	691.997.751.000	14%	turun
KABUPATEN LANDAK	1.034.149.326.660	1.026.185.236.151	1%	turun
KABUPATEN SANGGAU	722.300.230.000	629.532.976.737	15%	turun
KABUPATEN KAPUAS HULU	1.704.834.601.757	1.468.343.354.374	16%	turun
KABUPATEN SINTANG	1.313.364.775.000	1.194.279.446.000	10%	turun
KABUPATEN SEKADAU	722.300.230.000	629.532.976.737	15%	turun
RATA-RATA	18.988.019.717.564	15.879.432.645.967		20%

Sumber: Diolah (2021)

Secara umum pendapatan transfer pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami penurunan di era pandemi ini dengan rata-rata penurunan sebesar 20%. Adapun penurunan tertinggi dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, yaitu sebesar 132% dan terendah dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak yaitu sebesar 1%. Penurunan ini sesuai dengan prediksi World Bank (2020) bahwa pandemi covid 19 berdampak pada penurunan nilai *transfer from other government entities*.

## 5. KESIMPULAN

Simpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bahwa total pendapatan daerah pada pemerintah daerah kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di era

pandemi mengalami penurunan hal ini sejalan dengan prediksi World Bank (2020). Namun berbeda dengan perkembangan pendapatan asli daerah, sebab pada 6 pemerintah daerah baik kota/kabupaten yang terdapat pada Provinsi Kalimantan Barat justru mengalami kenaikan.

## REFERENSI

Abdul Halim. 2017. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (APBN/D). Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.

KPCPEN. 2020. Definisi Pandemi. Tersedia [online] di: <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dima-ksud%20dengan%20pandemi>. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 14.08.

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sage Belz and Louise Sheiner. 2020. [How will the coronavirus affect state and local government budgets?](https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/03/23/how-will-the-coronavirus-affect-state-and-local-government-budgets?). Tersedia [online] di: <https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/03/23/how-will-the-coronavirus-affect-state-and-local-government-budgets?>. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 12.57.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Santoso, Singgih. 2012b. Aplikasi SPSS pada Statistik Non Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siti Kurniati dan Tarmizi Achmad. 2008. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008. Tersedia [online]: [JURNAL SITI KURNIATI \(undip.ac.id\)](http://jurnal.siti.kurniati.undip.ac.id) Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 13.15.
- Suyash Tiwari. 2020. Impact of Lockdown on Government Revenue. Tersedia [online] di: <https://prsindia.org/theprsblog/impact-lockdown-government-revenue>. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 13.26.
- The World Bank. 2020. Government Financial Reporting in Times of the Covid-19 Pandemic. Tersedia [online] di: [154283.pdf \(worldbank.org\)](https://www.worldbank.org/154283.pdf) Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 17.50.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.